

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan yang mencerminkan temuan utama penelitian sesuai dengan tujuan dan rumusan masalah yang telah ditetapkan.

1. Secara keseluruhan, tingkat partisipasi masyarakat dalam Program KOTAKU di Kelurahan Tanjung Riau berada pada tingkat *informing* dimana masyarakat diberikan informasi tentang hak-hak mereka, tanggung jawab dan berbagai pilihan tetapi belum memiliki jaminan bahwa pandangan atau aspirasinya akan benar-benar dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan oleh *stakeholder* terkait. Pada tahap penetapan lokasi, partisipasi masyarakat hanya sebatas menerima informasi tanpa memiliki kendali terhadap pengambilan keputusan. Pada tahap perencanaan, masyarakat diberi ruang menyampaikan masukan melalui forum musyawarah, tetapi keputusan desain perencanaan tetap didominasi oleh pemerintah dan konsultan. Sementara pada tahap pelaksanaan, masyarakat terlibat langsung sebagai tenaga kerja atau pendukung teknis, tetapi tanpa otoritas dalam menentukan arah pembangunan. Pada tahap keberlanjutan, partisipasi masyarakat hanya sebatas menerima pelatihan tanpa memiliki kendali terhadap pengelolaan dan pemeliharaan aset pasca program. Dengan demikian, partisipasi masyarakat masih bersifat *tokenism* (penghargaan semu), sehingga belum mampu mendorong pemberdayaan dan penguatan peran masyarakat secara berkelanjutan.
2. Kondisi tersebut berdampak pada capaian program yang meskipun program KOTAKU yang secara fisik berhasil menurunkan kawasan kumuh serta meningkatkan aksesibilitas, interaksi sosial, dan peluang ekonomi, namun, program masih menghadapi tantangan pada aspek sosial, kelembagaan dan keberlanjutan. Rendahnya kesadaran pemeliharaan, belum jelasnya serah terima aset, lemahnya kelembagaan lokal, serta ketiadaan regulasi dan sistem pemeliharaan menyebabkan fasilitas kurang terawat serta keberlanjutan program terancam. Oleh karena itu, diperlukan pergeseran partisipasi dari *tokenism*

menuju *citizen power* melalui penguatan kelembagaan, dukungan regulasi, dan pemberdayaan berkelanjutan agar masyarakat berperan sebagai pengelola utama hasil pembangunan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan dalam penelitian ini, rekomendasi yang diusulkan dalam penelitian ini yaitu:

1. Partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan melalui program pelatihan, pendampingan, dan pembinaan yang berkelanjutan. Pemerintah dapat bermitra dengan perguruan tinggi, LSM, maupun sektor swasta dalam menyediakan kapasitas teknis dan manajerial bagi warga agar mereka tidak hanya menjadi pelaksana teknis, tetapi juga mampu berperan sebagai pengelola. Untuk menghindari dominasi pemerintah, diperlukan model kemitraan yang melibatkan pemerintah daerah, masyarakat, sektor swasta, dan lembaga donor. Pola ini memungkinkan adanya *power sharing*, di mana masyarakat memiliki posisi tawar (*citizen power*) dalam pengambilan keputusan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengelolaan pasca program.
2. Pemerintah daerah perlu menerbitkan regulasi turunan, seperti Peraturan Wali Kota, yang secara jelas mengatur mekanisme pemeliharaan aset hasil program. Regulasi ini mencakup pembagian tanggung jawab antara pemerintah, masyarakat, dan kelembagaan lokal, serta memberikan legitimasi hukum bagi skema iuran atau retribusi atau swadaya masyarakat agar dapat memberikan kontribusi pemasukan kawasan/daerah.
3. Disarankan adanya penelitian lanjutan yang mengeksplorasi model kelembagaan partisipatif yang paling sesuai dengan konteks kampung tua di Batam, serta kajian komparatif dengan lokasi lain penerima program KOTAKU atau dengan program sejenis, seperti PNPM Mandiri, atau PSPK untuk menemukan pola terbaik dalam menjamin keberlanjutan.